

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Penilaian Kesehatan Bank

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah (melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank. Dengan mengetahui kondisi bank para pihak-pihak tersebut dapat mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank. Perubahan eksposur risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berdampak pada kondisi bank secara keseluruhan.

Bagi perbankan, hasil penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai sarana penetapan kewajiban dan implementasi strategi pengawasan, agar pada waktu yang ditetapkan bank dapat menerapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank yang tepat.

Bank Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank. Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut kemudian dikenal dengan metode CAMEL (untuk saat ini yang diberlakukan di Indonesia). CAMEL merupakan aspek yang banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi kesehatan bank. Setelah dilakukan pengukuran dengan cara CAMEL, dilanjutkan dengan penilaian tingkat kepatuhan bank pada beberapa ketentuan khusus. Metode CAMEL berisikan langkah-langkah yang dinilai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponennya. Metode CAMEL mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Capital : untuk rasio kecukupan modal bank
- b. Assets : untuk rasio kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen : untuk menilai kualitas manajemen
- d. Earning : untuk rasio rentabilitas bank
- e. Liquidity : untuk rasio likuiditas bank

Langkah-langkah dalam perhitungan tingkat kesehatan bank adalah:

- a. Menghitung rasio berdasarkan rumus yang ditentukan,
- b. Menghitung besarnya nilai kredit untuk masing-masing komponen CAMEL,
- c. Mengalihkan nilai kredit tersebut dengan bobot masing-masing komponen CAMEL,

- d. Menjumlahkan seluruh nilai komponen CAMEL,
- e. Memperhitungkan nilai keseluruhan berkaitan dengan pemberian batas kredit,
- f. Menetapkan kategori kesehatan bank.

Tabel 2.1 Faktor Penilaian Kesehatan Bank

Faktor yang dinilai		Komponen	Bobot
1.	Permodalan	Rasio Modal terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)	25%
2.	Kualitas Aktiva Produktif	a. Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AD) b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank (PPAYD) terhadap Penyisihan yang Wajib Dibentuk oleh Bank (PPAWD)	30%
3.	Manajemen	a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	25%
4.	Rentabilitas	a. Rasio Laba Usaha rata-rata terhadap Volume Usaha b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	10%
5.	Likuiditas	a. Rasio kewajiban Bersih Atara Bank terhadap Modal Inti b. Rasio Kredit terhadap Dana yang diterima oleh Bank dalam rupiah dan valas	10%

Tabel 2.2 Predikat Penilaian Kesehatan Bank

Nilai Kredit CAMEL	Predikat
81 – 100	Sehat
66 < 81	Cukup Sehat
51 < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

Tingkat kesehatan bank yang sehat, cukup sehat, atau kurang sehat, akan tergantung atau diturunkan menjadi tidak sehat, apabila terdapat:

- a. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan,
- b. Campur tangan pihak-pihak diluar bank dalam kepengurusan bank, termasuk didalamnya kerjasama yang tidak wajar sehingga salah satu beberapa kantornya berdiri sendiri,
- c. *Window dressing* dalam pembukuan atau laporan bank yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan keuangan sehingga mengakibatkan penilaian yang salah terhadap bank,
- d. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring,
- e. Ketentuan lain yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia pada prinsipnya sama untuk setiap bank baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.¹

¹ Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm 465-466

2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR atau Rasio Pembiayaan)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

a. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank Syariah dalam mengembalikan dana yang sudah dihimpun kepada nasabah deposan. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka *Financing to Deposit Ratio* suatu bank, berarti bank tersebut digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka *Financing to Deposit Ratio* yang kecil. Rumus untuk menghitung *Financing to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi 110%.² Yang berarti bank boleh memberikan

² Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*,(Jakarta: Bumi Aksara,2010) hlm784-785

kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.

Financing to Deposit Ratio dapat pula digunakan untuk menilai strategi suatu bank. Manajemen bank konservatif biasanya cenderung memiliki nilai yang relatif rendah. Sebaliknya bila *Financing to Deposit Ratio* melebihi batas toleransi dapat dikatakan manajemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif.³

b. Penyaluran Dana

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan Konvensional yang berbasis pada bunga, sedangkan dalam perbankan Syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki ataupun bagi hasil. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, antara lain: pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan dengan akad pelengkap.⁴

³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 75

⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 97

Pada kategori jual beli dan sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Pada kategori bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

c. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu pada pedoman yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan umum penyaluran dana bank. Penerapan prinsip kehati-hatian pada dasarnya mengurangi resiko penyaluran dana yang berakibat pada penurunan tingkat keuntungan bank. Kebijakan pokok dalam penyaluran dana meliputi:

- 1) Penerapan prinsip kehati-hatian melalui prosedur penyaluran dana yang sehat, penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap *plafondering*, prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah.
- 2) Kebijakan penyaluran dana pihak terkait.
- 3) Pemetaan sektor ekonomi dan segmen pasar.
- 4) Penyaluran dana yang perlu dihindari meliputi penyaluran dana yang bertentangan dengan syariah, untuk tujuan spekulasi,

kepada nasabah yang bermasalah dan lainnya yang dapat merugikan bank nantinya.⁵

3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR atau Rasio Permodalan)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

a. *Pengertian Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank.⁶ Rumus untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Total Equity}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal.⁷

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang

⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 95-101

⁶ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm 161

⁷ Tarmizi Achmad dan Wilyanto Kusumo, "*Analisis Rasio-Rasio Keuangan sebagai Predictor dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Indonesia*," *Media Ekonomi dan Bisnis* Vol. XV No.1, 2003. Hlm 14. <https://jab.fe.uns.ac.id> yang diakses pada 10 Agustus 2018, pukul 19.30 WIB

mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang).⁸

Capital Adequacy Ratio (CAR) berguna untuk mengukur kemampuan dana internal untuk menutup kredit macet. Semakin besar nilai rasio ini semakin baik performa perkreditan bank tersebut karena semakin besar dana yang tersedia untuk menutup kredit macet.⁹ Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Dengan kata lain, maka semakin tinggi kecukupan modalnya untuk menanggung risiko kredit macetnya, kinerja suatu bank semakin baik, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan yang berujung pada meningkatnya profitabilitas.

b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut maka semakin baik

⁸ Rara Sekar Arum, Pengaruh Inflasi, *Financing to Deposite Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015,(Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan,2016) hlm 44. Diakses tanggal 30 September 2018 pukul 13.00 WIB

⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm 306

posisi modal sebuah bank. Menurut Muhammad, modal disini meliputi:

- 1) Modal disetor maupun dana setoran modal
- 2) Cadangan umum
- 3) Cadangan lainnya
- 4) Sisa laba tahun lalu
- 5) Laba tahun berjalan

Ketentuan mengenai batas minimum CAR tersebut dari waktu ke waktu telah diubah oleh Bank Indonesia, antara lain:

- 1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 MEI 1993, bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Ratio (ATMR).
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR. Penurunan ini dikarenakan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada saat itu.¹⁰

¹⁰ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm 785

4. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF).

a. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Jadi kenaikan pada sekelompok kecil barang atau perubahan harga belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Laju inflasi merupakan fenomena ekonomi yang lazim terjadi pada suatu perekonomian. Inflasi akan menjadi suatu persoalan ekonomi yang serius manakala berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan berada pada level yang tinggi. Secara teoritis inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Jadi kenaikan pada sekelompok kecil barang atau perubahan harga belum bisa dikatakan sebagai inflasi.

Pada perekonomian modern inflasi sangat bersifat inersial artinya bahwa gejala inflasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari gejala ekonomi. Gejala inflasi inersial bersifat tetap dan jangka panjang sehingga bisa diprediksikan. Namun inflasi inersial akan mengalami perubahan manakala timbul guncangan (*shock*) pada sisi permintaan agregat atau perubahan harga minyak dunia, pergeseran

nilai tukar, kegagalan panen dan sebagainya.¹¹ Berikut rumus inflasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Semakin tinggi angka inflasi menyebabkan beban hidup semakin tinggi pula. Ini dapat mengakibatkan biaya konsumsi akan semakin meningkat dan pendapatan riil akan menurun sehingga mengakibatkan nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan.¹²

Kondisi inflasi yang tinggi akan mengakibatkan risiko tinggi pula terhadap kredit/ pembiayaan yang diberikan. Meskipun nasabah telah melunasi kredit dan bunga, bila dibandingkan dengan daya beli rupiah menurun. Biasanya inflasi yang tinggi ditandai dengan tingkat suku bunga yang tinggi pula.¹³

b. Teori Inflasi

Paling tidak ada empat teori tentang inflasi yang menjadi patokan penyebab dan pemberian solusi ketika terjadi inflasi. Keempat teori

¹¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: PT. Macana Jaya Cemerlang,2008), hlm 74

¹² Mia Marawa Auliani, *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014*,(Semarang,2016) hlm 7. Diakses tanggal 30 September 2018 pukul 13.00 WIB

¹³ Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm 275

tersebut diantaranya adalah teori kuantitas, teori keynes, teori strukturalis, dan mark up model. ¹⁴

1) Teori Kuantitas

Inti dari teori kuantitas adalah pertama, bahwa inflasi itu hanya bisa terjadi jika ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Inti yang kedua adalah laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang.

2) Teori Keynes

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang dapat disediakan oleh masyarakat. Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes bahwa ini terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan agresif masyarakat.

3) Teori Strukturalis.

Teori ini biasa disebut dengan teori inflasi jangka panjang, karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya penawaran bahan makanan dan barang-barang ekspor.

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2008), hlm 135

4) Mark-up Model

Dalam teori ini dasar pemikirannya ditentukan oleh dua komponen yakni *cost of production* dan *profit margin*. Jadi apabila ada kenaikan antara kedua komponen maka harga jual komoditi di pasar juga akan meningkat.

c. Pembagian Inflasi Menurut Sifatnya

Sifat perubahan inflasi berbeda-beda tergantung faktor yang mempengaruhinya. Inflasi ditinjau dari sifat perubahannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: ¹⁵

- 1) Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*), biasanya *creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi rendah (kurang dari 10% per tahun). Pergerakan inflasi berjalan secara lamban dan dalam waktu yang cukup lama.
- 2) Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya diatas 10% pertahun) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat dari pada inflasi merayap.

¹⁵ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, hlm 74

- 3) Inflasi Tinggi (*Hyperinflation*), inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya (>100% setahun). Keinginan untuk menyimpan uang menurun dan nilai dari uang seiring waktu merosot dengan tajam. Kecenderungan timbulnya ketika pemerintah mengalami struktur anggaran belanja (misalnya timbul akibat perang) yang dibiayai atau ditutup dengan mencetak uang.

d. Sebab terjadinya inflasi

Dalam teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan oleh penambahan jumlah uang beredar dan ada 3 sebab terjadinya inflasi, diantaranya:

- 1) Inflasi tarikan permintaan (*Demand-pull Inflation*)

Inflasi tarikan permintaan ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*), sedangkan produksi-produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan penuh.

- 2) Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*)

Inflasi ini bersumber dari masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang diakibatkan kenaikan biaya produksi. Pertambahan biaya produksi mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil resiko yang akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya. Inflasi ini juga terjadi pada saat

perekonomian berkembang dengan pesat ketika pengangguran sangat rendah.

3) Inflasi di impor (*imported inflation*)

Inflasi ini muncul akibat meningkatnya harga barang-barang impor. Apalagi barang tersebut mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Contohnya minyak bumi.¹⁶

5. *Non Performing Financing* (NPF atau Pembiayaan Bermasalah)

a. Pengertian *Non Performing Financing*

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat.¹⁷

Istilah lain *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁸

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berpotensi tidak mampu mengembalikan pembiayaan (secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu) berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama. Besarnya *Non*

¹⁶ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, hlm 75-76

¹⁷ Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, (*Jurnal Dinamika Manajemen (JDM)* vol 4 No. 1, 2013, pp:82- 92), <http://journal.unnes.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus pukul 18.00 WIB

¹⁸ Faturrahman Jamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 66

Performing Finance yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penelitian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperoleh.¹⁹

b. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa yaitu:

- a) lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan,
- b) lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran,
- c) kebijakan piutang yang kurang tepat,
- d) penempatan berlebihan pada aktiva tetap,
- e) permodalan yang tidak cukup.²⁰

2) Faktor Ekstern

Merupakan faktor-faktor yang berada diluar kuasa manajemen perusahaan seperti:

- a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya
- b) Melakukan *side streaming* penggunaan dana

¹⁹ Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm. 160-161

²⁰ Faturrahman Jamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm 73

- c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- d) Usaha yang dijalankan relatif baru
- e) Adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. Hal tersebut memang berada diluar kuasa manajer ataupun pimpinan namun bukan berarti menghilangkan rasa tanggung jawab bersama dalam memberikan bantuan ataupun solusi kepada nasabah.

c. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Penggolongan ini didasarkan pada kemampuan membayar nasabah terhadap angsuran, antara lain:

- 1) Lancar yakni dikatakan demikian apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- 2) Dalam perhatian khusus yakni apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari.

- 3) Kurang lancar yakni jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).
- 4) Diragukan yakni jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9 bulan).
- 5) Macet yakni apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat di cairkan pada nilai wajar.²¹

Penggolongan pembiayaan bermasalah seperti yang dikemukakan diatas dapat membuat bank lebih cekatan dalam pengambilan keputusan, agar bank setidaknya terselamatkan dari pembiayaan bermasalah.

d. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bahwa pemberian suatu fasilitas pembiayaan (kredit) mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya pembiayaan (kredit) tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan (kredit) disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- 1) Dari pihak perbankan yang artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat

²¹ Faturrahman Jamil, *Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm 69-71

kolusi dari pihak analisis pembiayaan (kredit) dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

- 2) Dari pihak nasabah yakni ketika kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidak sengajaan. Adanya unsur kesengajaan dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet dan dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.

Selanjutnya, unsur ketidak sengajaan artinya ketika debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.²² Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka Bank syariah yaitu:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya,
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank,

²² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 128-130.

3) Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.²³

Melalui upaya penyelamatan tersebut diharapkan nasabah mampu melakukan angsuran kembali kepada bank meskipun ada sedikit penundaan pembayaran angsuran.

6. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah seiring berjalannya waktu dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencari sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.²⁴

b. Prinsip Bank Islam

²³ Trisadini dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 109

²⁴ Veithzal Rifai dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 758-759

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip:

- 1) Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- 2) Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
- 3) Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta.
- 4) Prinsip keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- 5) Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama

dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *Rakhmatan lil alamin*

- 6) Tidak ada riba dan laba wajar.

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional. Fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standars akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) sebagai berikut:

- 1) Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah,
- 2) Investor, sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa,
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan atau jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya, dan
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵

²⁵ Veithzal Rifai dkk., *Bank and Financial Institution Management*, Ibid. Hlm 759-766

7. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.

Laporan keuangan bank sama dengan laporan keuangan perusahaan, bedanya bank diwajibkan menyertakan laporan komitmen dan kontijensi. Setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, laporan yang harus dipublikasikan kepada masyarakat umum antara lain: neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi yang dilengkapi dengan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya, perhitungan rasio keuangan, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, serta transaksi valuta asing dan derivatif.

b. Tujuan Laporan Keuangan

- 1) Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan (termasuk bank) pada suatu saat tertentu.

- 2) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- 3) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi suatu perusahaan.
- 4) Memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang bersangkutan.²⁶

c. Syarat-syarat Laporan Keuangan

- 1) Relevan: Data yang diolah, ada kaitannya dengan transaksi.
- 2) Jelas dan dapat dipahami: Informasi yang disajikan, harus ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan.
- 3) Dapat diuji kebenarannya: Data dan informasi yang disajikan harus dapat ditelusuri kepada bukti asalnya.
- 4) Netral: Laporan keuangan yang disajikan dapat dipergunakan oleh semua pihak.
- 5) Tepat waktu: Laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar.

²⁶ Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm 375-376

- 6) Dapat diperbandingkan: Laporan keuangan yang disajikan harus dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
- 7) Lengkap: Data yang disajikan dalam informasi akuntansi, harus lengkap sehingga tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan.

d. Sifat dan Keterbatasan Laporan Keuangan

- 1) Bersifat historis, yaitu merupakan kejadian yang telah lewat. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
- 3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian dan lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan sebagai berikut:

Dinar Alfian Akbar (2016)²⁷, dalam penelitiannya yang berjudul “Inflasi, GDP, CAR dan FDR terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014”. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pembiayaan bermasalah, untuk menguji

²⁷ Dinar Alfian Akbar, *Inflasi, GDP, CAR dan FDR terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014*, I-Economic Vol.2.No.2, 2016. Diakses tanggal 30 September 2018 pukul 13.00 WIB

pengaruh GDP terhadap pembiayaan bermasalah, untuk menguji pengaruh CAR terhadap pembiayaan bermasalah, untuk menguji pengaruh FDR terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. Populasi yang digunakan yaitu semua Bank Umum Syariah yang terdaftar direktori Bank Indonesia periode 2010-2014 yaitu sebanyak 12 Bank Syariah. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, tercatat ada enam sampel yang digunakan.

Hasil inflasi tidak berpengaruh terhadap *Non performing Financing* (NPF); *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh negatif terhadap *Non performing Financing* (NPF); CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh negatif terhadap *Non performing Financing* (NPF); *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*; variabel inflasi, *Gross Domestic Product* (GDP), CAR (*Capital Adequacy Ratio*) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel independent (X) dan variabel dependen (Y). Pada penelitian Dinul variabel independent inflasi (X_1), GDP (X_2), CAR (X_3), FDR (X_4), dan variabel dependen (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel independent FDR (X_1), CAR (X_2), Inflasi (X_3), dan variabel dependen (Y) adalah *Non Performing*

Financing. Studi kasus yang digunakan yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2011-2018.

Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman (2017)²⁸, penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) pada Perbankan Syariah di Indonesia seperti: *Financing to Deposite Ratio* (FDR), Kurs dan Inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Publikasi pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam kurun waktu enam tahun. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah melalui aplikasi *Eviews 7.0*.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Financing to Deposite Ratio* (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF), serta *Financing to Deposite Ratio* (FDR), Kurs, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel independent (X) dan variabel dependen (Y). Pada penelitian Kartika

²⁸ Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016*, Jurnal Ekonomi Syariah. Vol.5.No.2,2017. Diakses tanggal 30 September 2018 pukul 13.00 WIB

dan Wahibur variabel independent FDR (X_1), Kurs (X_2), Inflasi (X_3) dan variabel dependen (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel independent FDR (X_1), CAR (X_2), Inflasi (X_3), dan variabel dependen (Y) adalah *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah Tahun 2011-2018.

Mares Suci Ana popita (2013)²⁹, penelitiannya yang berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor eksternal yang terdiri dari GDP, Inflasi, SWBI dan penyebab internal yang terdiri dari variabel FDR, RR, Total Aset yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan karena nilai NPF bersifat fluktuatif, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Data penelitian ini adalah Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP riil dan FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF dan inflasi, SWBI, RR

²⁹ Mares Suci Ana Popita, Analisis Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal*.2.4,2013

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF sedangkan Total Aset mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

Adapun persamaan adalah pembahasan pada variabel independent GDP (X_1), inflasi (X_2), SWBI (X_3), FDR (X_4), RR (X_5), Total Aset (X_6), dan variabel dependen (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada studi kasus yang digunakan. Pada penelitian Mares Suci studi kasus yang diangkat yaitu pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2008-2013. Sedangkan penelitian yang saya lakukan studi kasus yang diangkat yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2011-2018

Rara Sekar Arum (2016)³⁰, dengan judul “Pengaruh Inflasi, *Financing to Deposite Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Panin Bank Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Hasil penelitian dengan uji regresi ditemukan bahwa variabel independen Inflasi dengan tingkat signifikan sebesar 0,033, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan tingkat signifikan sebesar 0,005 secara parsial berpengaruh

³⁰ Rara Sekar Arum, Pengaruh Inflasi, *Financing to Deposite Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015,(Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan,2016) Diakses tanggal 30 September 2018 pukul 13.00 WIB

signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Adapun persamaan adalah pembahasan pada variabel independent inflasi (X_1), FDR (X_2), CAR (X_3) dan variabel dependen (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada studi kasus yang digunakan. Pada penelitian Rara studi kasus yang diangkat yaitu pada Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Panin Bank Syariah, BNI Syariah, Bank Muamalat, BCA Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2010-2015. Sedangkan penelitian yang saya lakukan studi kasus yang diangkat yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2011-2018.

Ajeng Kurnia Rahmawati Ningrum (2017)³¹, dengan judul “Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2016”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia mempunyai fluktuasi sangat tinggi. Adapun beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi *Non Performing Financing* adalah: faktor eksternal (Kurs dan Inflasi) dan faktor internal (*Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di

³¹Ajeng Kurnia Rahmawati Ningrum, *Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2016*,(Jakarta : Skripsi tidak Dipublikasikan, 2017) Diakses tanggal 30 September 2018 pukul 13.00 WIB

Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan beberapa kriteria, yaitu (a) Bank Umum Syariah tersebut terdaftar di Bank Indonesia dan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (b) Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan kuartalan selama periode 2010-2016, (c) Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurs dan Biaya Operasional terhadap Pembiayaan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*. Sedangkan, inflasi dan *Capital Adequancy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel independent (X) dan variabel dependen (Y). Pada skripsi Ajeng variabel independent Kurs (X_1), Inflasi (X_2), CAR (X_3), BOPO (X_4) dan variabel dependen (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah Periode 2010-2016. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel independent FDR (X_1), CAR (X_2), Inflasi (X_3), dan variabel dependen (Y) adalah *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2011-2018.

Umi Uswatun Khasanah (2017)³², dengan judul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap *Non Performing Financing* (Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah, (2) Pengaruh Suku Bunga (*BI Rate*) terhadap *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah, (3) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah. Periode penelitian ini adalah Periode 2013-2015.

Penelitian ini bersifat Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah periode 2013 sampai dengan 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi sebesar 1,246 dan signifikansi 0,222. (2) Variabel Suku Bunga berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* dengan koefisien sebesar 3,693 dan signifikansi 0,001 . (3) Variabel Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non Performing Financing* dengan koefisien regresi sebesar -0,731 dan signifikansi 0,470.

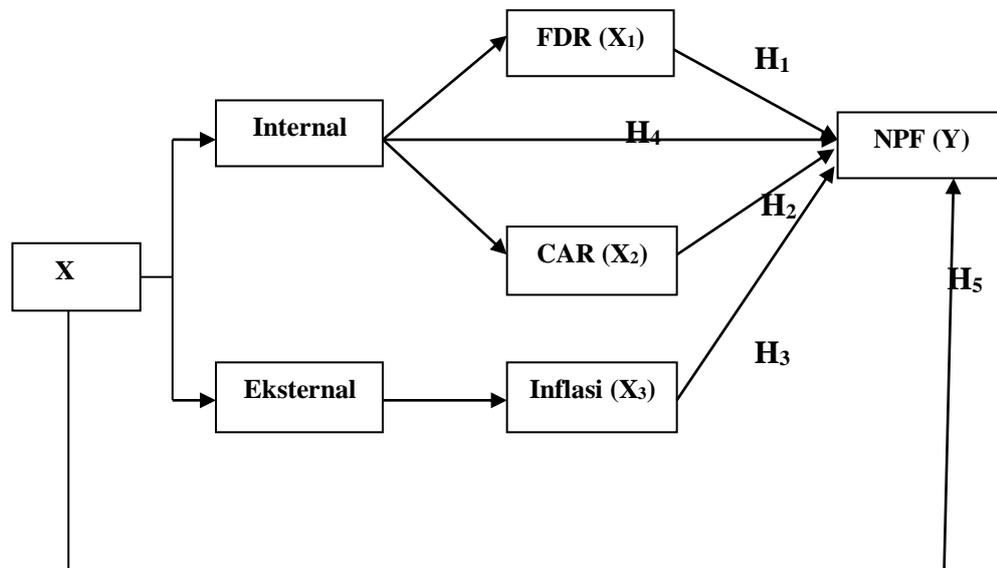
³² Umi Uswatun Khasanah, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Non Performing Financing (Study Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2013-2015)*, (Surakarta : Skripsi tidak Dipublikasikan, 2017) Diakses tanggal 30 September 2018 pukul 13.00 WIB

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah pembahasan pada variabel independent (X) dan variabel dependen (Y). Pada skripsi Umi variabel independent Inflasi (X_1), Suku Bunga (X_2), Nilai Tukar (X_3) dan variabel dependen (Y) yaitu *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2013-2015. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti variabel independent FDR (X_1), CAR (X_2), Inflasi (X_3), dan variabel dependen (Y) adalah *Non Performing Financing*. Studi kasus yang digunakan yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2011-2018.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi gambaran pola hubungan antar variabel yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.³³ Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah di dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Maka penulis membuat suatu kerangka konseptual sebagai berikut :

³³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 256.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Variabel bebas (X) dari FDR (X_1), CAR (X_2), dan Inflasi (X_3) sedangkan variabel terikat adalah NPF (Y) pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah.

Keterangan:

1. H_1 : Pada hipotesis 1 menjelaskan mengenai pengaruh variabel FDR (X_1) terhadap NPF (Y).
2. H_2 : Pada hipotesis 2 menjelaskan mengenai pengaruh variabel CAR (X_2) terhadap NPF (Y).
3. H_3 : Pada hipotesis 3 menjelaskan mengenai pengaruh variabel Inflasi (X_3) terhadap NPF (Y).
4. H_4 : Pada hipotesis 4 menjelaskan secara bersama-sama yaitu FDR (X_1) dan CAR(X_2) berpengaruh terhadap NPF (Y)
5. H_5 : Pada hipotesis 5 menjelaskan secara bersama-sama yaitu FDR (X_1), CAR (X_2), dan Inflasi (X_3) berpengaruh terhadap NPF (Y).

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.³⁴ Berdasarkan kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan:

- H₁ : *Financing to Deposite Ratio* (FDR) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF).
- H₂ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF).
- H₃ : Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
- H₄ : *Financing to Deposite Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing*.
- H₅ : *Financing to Deposite Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing*.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 96

